

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya serta pembangunan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hakikat pembangunan ini mengandung makna bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang hasilnya secara merata dirasakan oleh masyarakat, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, mengurangi perbedaan kemampuan antar daerah, serta struktur perekonomian yang seimbang. Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan dari pembangunan ekonomi suatu negara adalah dilihat dari kesempatan kerja yang diciptakan dari pembangunan ekonomi (Suharsono Sagir, 2000).

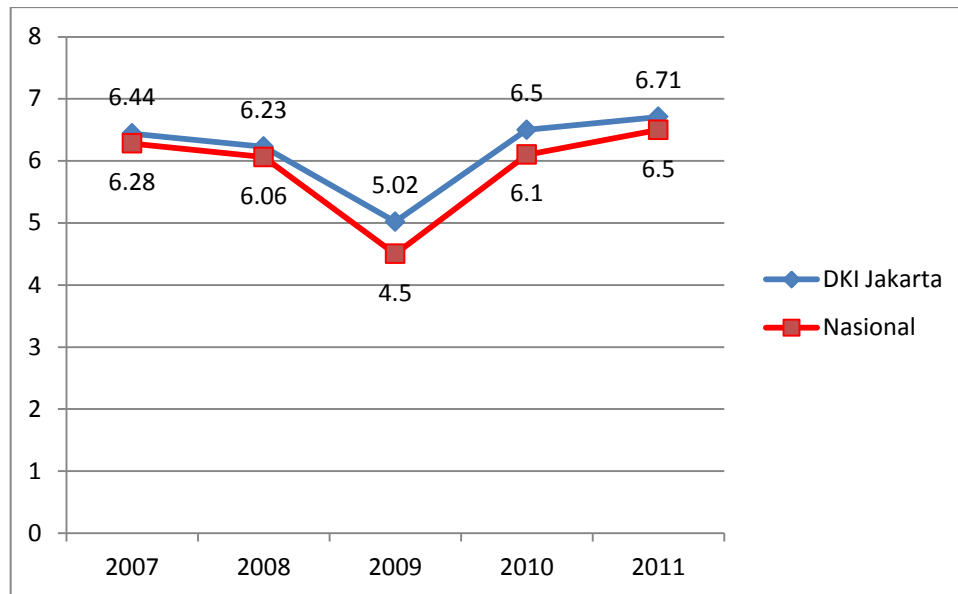
Semenjak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus secara komprehensif mengenai keadaan dan permasalahan daerah yang dihadapi dalam proses pembangunan. Implikasi otonomi daerah diharapkan dapat menjadi lebih baik dalam hal pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dibandingkan dengan masa sebelum otonomi daerah.

Salah satu implikasi dari pemberlakuan otonomi daerah dalam pembangunan ekonomi yakni adanya kemampuan daerah untuk meningkatkan penciptaan kesempatan kerja dan distribusi pendapatan masyarakat yang merata sehingga menjadi indikasi keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan wilayah di Indonesia tidak terkecuali provinsi DKI Jakarta. Oleh karenanya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah pada khususnya, semenjak diberlakukannya otonomi daerah pada awal tahun 2001, provinsi DKI Jakarta merencanakan prioritas pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kesempatan kerja tergantung pada beberapa faktor, di antaranya : pertumbuhan output, tingkat upah dan harga harga dari faktor produksi lainnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa hubungan antara pertumbuhan output dengan peningkatan jumlah kesempatan kerja dapat digambarkan lewat hubungan antara pasar barang dengan pasar tenaga kerja. Apabila di semua pasar terjadi peningkatan output, maka secara agregat terjadi pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ekonomi akan mendorong adanya pertumbuhan kesempatan kerja. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan kesempatan kerja (Tambunan 2001).

Ada kecenderungan bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi yang membuat semakin tinggi pendapatan masyarakat per kapita mengakibatkan semakin cepat perubahan struktur ekonomi dengan asumsi bahwa faktor-faktor

penentu lainnya yang mendukung proses tersebut seperti manusia (tenaga kerja), bahan baku, dan teknologi tersedia.



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012.

**Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi (%) DKI Jakarta dan Nasional.**

DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia masih menjadi wilayah pusat perekonomian Indonesia. Berdasarkan Gambar 1 di atas terlihat dari laju pertumbuhannya, DKI Jakarta lebih besar dari rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional. Selama tahun 2007 – 2011 terlihat pertumbuhan ekonomi yang bergerak secara fluktuatif, pada tahun 2007 laju pertumbuhan DKI Jakarta sebesar 6,44% kemudian mengalami penurunan selama 2 tahun berturut-turut, setelah itu pada tahun 2010 dan 2011 mengalami peningkatan kembali bersama-sama dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta berada pada angka 6,71persen sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada angka 6,5 persen.

Pertumbuhan ekonomi daerah diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung ataupun tidak langsung akan menciptakan lapangan kerja (Arsyad, 1999).

**Tabel 1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 DKI Jakarta Tahun 2001-2011.**

Tahun	PDRB (Jutaan Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2001	238.656.138	4,74
2002	250.331.157	4,89
2003	263.624.242	5,31
2004	278.524.822	5,65
2005	295.270.544	6,01
2006	312.826.713	5,95
2007	332.971.255	6,44
2008	353.723.391	6,23
2009	371.469.499	5,02
2010	395.633.575	6,50
2011	422.162.571	6,71

*Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, berbagai tahun (diolah).*

Berdasarkan data yang dapat dilihat di Tabel 1.1, PDRB DKI Jakarta mengalami peningkatan sepanjang tahun 2001-2011. Peningkatan tersebut bergerak secara fluktuatif dan menunjukkan pertumbuhan dan kemajuan dalam perekonomian. Pada tahun 2001 PDRB DKI Jakarta sebesar Rp. 238.656.138.000.000 dan meningkat secara signifikan sampai tahun 2005 serta menghasilkan pertumbuhan yang terus bergerak naik. Peningkatan secara drastis dapat dilihat pada tahun 2010 dan 2011 yaitu sebesar 395.633.575.000.000 dan 422.162.571.000.000.

Meningkatnya perekonomian di DKI Jakarta tentunya tidak terlepas peranan investasi dan stok modal yang tersedia. Karena kegiatan investasi memungkinkan masyarakat suatu daerah untuk terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesempatan kerja serta meningkatkan taraf kemakmuran (Sukirno, 2000).

Tumbuhnya investasi-investasi baru memungkinkan terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pengangguran, dengan demikian terjadi penambahan output dan pendapatan baru pada faktor produksi tersebut akan menambah output nasional sehingga akan terjadi pertumbuhan ekonomi.

Hal serupa juga disampaikan oleh Tambunan (2001) yang menjelaskan bahwa investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang, kegiatan produksi menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, yang selanjutnya meningkatkan permintaan di pasar.

Penanaman modal yang dilakukan pihak swasta baik yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri, diharapkan dapat memacu ekonomi dan akan menciptakan *multiplier effect*, di mana kegiatan tersebut akan merangsang kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya dan pada akhirnya akan memperluas kesempatan kerja dan meringankan masyarakat.

Tumbuhnya iklim investasi yang sehat dan kompetitif diharapkan akan memacu perkembangan investasi yang saling menguntungkan dalam pembangunan daerah, sedangkan penurunan nilai investasi akan berdampak terhadap berkurangnya aktivitas usaha dari pelaku bisnis. Berkurangnya aktivitas usaha ini sekaligus juga akan berdampak terhadap berkurangnya penggunaan tenaga kerja dan menurunkan kesempatan kerja.

Pentingnya peranan investasi dalam meningkatkan perekonomian dan kesempatan kerja mendorong pemerintah dan swasta berupaya untuk menghimpun dana yang diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif yaitu dengan mendorong terciptanya penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) karena pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan akan lebih sulit dilakukan pemerintah daerah apabila tanpa adanya dukungan dari pihak swasta.

**Tabel 2. Perkembangan Investasi PMDN dan PMA di DKI Jakarta Tahun 2001-2011.**

Tahun	PMDN (Juta Rp)		PMA (Ribu US \$)	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
2001	45	5.752.926	487	313.475
2002	44	2.225.941	561	1.234.429
2003	44	3.343.950	514	5.395.705
2004	35	4.173.915	592	1.867.972
2005	24	2.546.000	364	3.267.000
2006	29	3.088.000	330	1.472.000
2007	34	4.218.000	365	4.680.000
2008	34	1.837.000	434	9.928.000
2009	35	9.694.000	433	5.511.000
2010	86	4.598.517	886	6.428.732
2011	89	9.256.404	1.148	4.824.000

*Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, berbagai tahun (diolah).*

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat perkembangan investasi yang mencakup PMA dan PMDN di DKI Jakarta tahun 2001-2011 sangat berfluktuatif. Peningkatan PMDN yang signifikan terjadi pada tahun 2009 dari jumlah 35 proyek yang ditanam investor dalam negeri bernilai 9.694.000 (dalam jutaan rupiah), pada tahun yang sama dari jumlah 433 proyek yang ditanam investor asing bernilai 5.511.000 (dalam US \$). Sedangkan peningkatan signifikan di PMA terjadi pada tahun 2008 dari jumlah 434 proyek yang ditanam investor asing bernilai 9.928.000 (dalam US \$), pada tahun yang sama dari jumlah 34 proyek yang ditanam investor dalam negeri bernilai 1.837.000 (dalam jutaan rupiah).

Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi.

Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja (Gianie, 2009).

**Tabel 3 Perkembangan UMP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2001-2011.**

Tahun	Upah Minimum Provinsi (UMP)	Peningkatan (%)
2001	Rp 426.257	-
2002	Rp 591.266	0,28
2003	Rp 631.554	0,06
2004	Rp 671.550	0,06
2005	Rp 771.843	0,13
2006	Rp 819.100	0,06
2007	Rp 900.560	0,09
2008	Rp 972.604	0,07
2009	Rp 1.069.865	0,09
2010	Rp 1.118.009	0,04
2011	Rp 1.290.000	0,13

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, berbagai tahun (diolah).

UMP DKI Jakarta mengalami peningkatan dari tahun 2001-2011, rata-rata tingkat peningkatan UMP selama 2001-2011 adalah sebesar 10,22 setiap tahunnya.

Peningkatan UMP yang terbesar terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar Rp.591.266 yang naik sebanyak 28 dari tahun 2011. Pada tahun 2011 UMP di DKI Jakarta sebesar Rp 1.290.000 yang naik sebanyak 13 dari tahun 2010.

Tenaga kerja merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Salah satu sasaran utama pembangunan Indonesia adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Upaya pembangunan pada setiap negara selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha agar setiap penduduknya dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan).

**Tabel 4. Penduduk DKI Jakarta Berusia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2006-2011.**

Tahun	Jenis Kegiatan			Total	Persentase %
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	Bukan Angkatan Kerja		
2006	3.531.799	590.022	2.449.913	6.571.734	53,74
2007	3.842.944	552.380	2.371.599	6.766.923	56,79
2008	4.191.966	580.511	2.176.604	6.949.081	60,32
2009	4.118.390	569.337	2.351.354	7.039.081	58,50
2010	4.689.761	582.843	2.500.208	7.772.812	60,33
2011	4.588.418	555.408	2.271.861	7.415.687	61,87

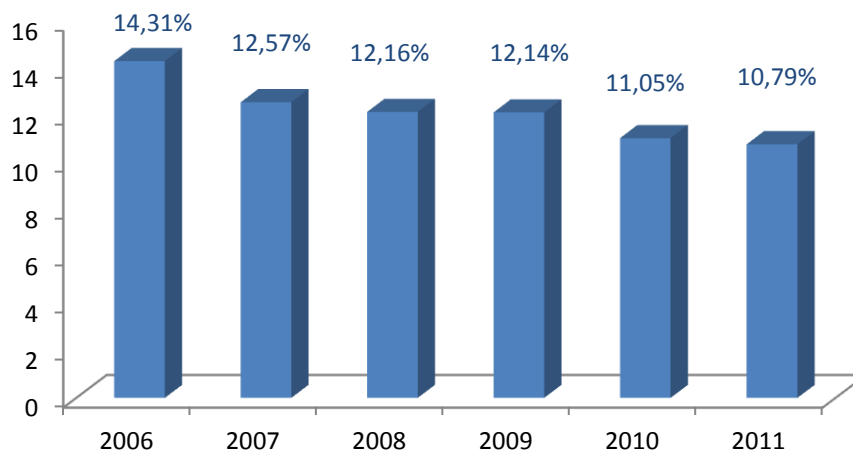
*Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2012.*

Dari Tabel 1.4 terlihat bahwa jumlah Penduduk DKI Jakarta yang berada dalam usia kerja (usia 15 tahun keatas) mengalami peningkatan yang cukup signifikan



sejak tahun 2006. Sedangkan penduduk usia kerja yang terhitung sebagai bukan angkatan kerja mengalami perubahan yang fluktuatif sejak tahun 2006-2011. Penduduk usia kerja yang bekerja (kesempatan kerja) sejak tahun 2006-2008 mengalami peningkatan yang cukup drastis dan kesempatan kerja terbanyak pada tahun 2010.

Pada kurun waktu yang sama kita lihat di Gambar 1.2 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja) yang terus menurun. Penurunan tingkat pengangguran terbuka yang sangat drastis terlihat pada tahun 2007. Namun sampai saat ini tingkat pengangguran terbuka DKI Jakarta masih berada pada angka diatas 10.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta 2012 (data diolah).

**Gambar 2. Diagram Tingkat Pengangguran Terbuka DKI Jakarta 2006-2011**

DKI Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi daerah pusat perekonomian dan memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Bertambahnya masyarakat yang ingin mencari pekerjaan di DKI Jakarta akan menjadi suatu permasalahan apabila tidak diiringi dengan perkembangan penciptaan lapangan pekerjaan.

Berdasarkan fenomena perekonomian yang telah dijelaskan, maka dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah di DKI Jakarta yang berkesinambungan dan sinergis serta mencapai Visi Pembangunan DKI Jakarta 2007-2012 “JAKARTA YANG NYAMAN DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA” diperlukan upaya yang maksimal dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Upaya meningkatkan kesempatan kerja dalam mendorong peningkatan aktivitas perekonomian melalui perkembangan investasi dan PDRB serta ketetapan upah yang mendorong terjadinya keseimbangan di pasar tenaga kerja merupakan upaya yang dapat dilakukan guna menyelesaikan permasalahan perekonomian yang menghambat keberhasilan pembangunan DKI Jakarta. Oleh karena itu penulis menyusun skripsi dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEMPATAN KERJA DI DKI JAKARTA”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kesempatan Kerja di DKI Jakarta pada tahun 2001-2011?
2. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap Kesempatan Kerja di DKI Jakarta pada tahun 2001-2011?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Kesempatan Kerja di DKI Jakarta pada tahun 2001-2011?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kesempatan Kerja di DKI Jakarta pada tahun 2001-2011.
2. Menganalisis pengaruh Investasi terhadap Kesempatan Kerja di DKI Jakarta pada tahun 2001-2011.
3. Menganalisis pengaruh Tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Kesempatan Kerja di DKI Jakarta pada tahun 2001-2011.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai :

1. Dapat dijadikan sebagai pelatihan intelektual yang diharapkan dapat mempertajam daya pikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi dalam disiplin ilmu yang dipelajari.
2. Dapat digunakan oleh pemerintah dalam pertimbangan perencanaan strategi pembangunan ekonomi di DKI Jakarta serta membantu pemerintah dalam melakukan kajian untuk menciptakan kesempatan kerja.
3. Dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi peneliti lainnya agar dapat memberikan kontribusi yang positif bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

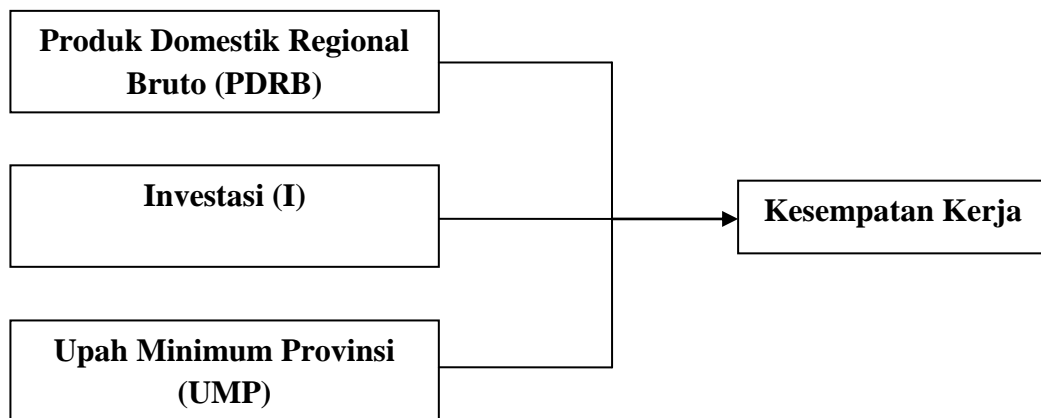
## E. Kerangka Pemikiran

Tenaga kerja merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Hubungan antara pertumbuhan output dengan peningkatan jumlah kesempatan kerja dapat digambarkan lewat hubungan antara pasar barang dengan pasar tenaga kerja. Apabila di semua pasar terjadi peningkatan output, maka secara agregat terjadi pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ekonomi akan mendorong adanya pertumbuhan kesempatan kerja. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang digambarkan melalui peningkatan PDRB, maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan kesempatan kerja.

Teori Harrod-Domar menyatakan bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang membesar tersebut membutuhkan jumlah tenaga kerja yang besar pula, di mana dalam kondisi seperti ini diasumsikan bahwa tenaga kerja meningkat secara geometris dan selalu *full employment*.

Secara teoritis permintaan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh tingkat upah. Undang-undang upah minimum menetapkan harga terendah tenaga kerja yang harus dibayarkan tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja di DKI Jakarta. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja dalam penelitian ini antara lain PDRB, Investasi dan UMP. Alur kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 3. Kerangka Pemikiran.**

### **G. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, tinjauan pustaka dan berbagai hasil kajian empiris yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- a. Diduga PDRB berpengaruh positif terhadap Kesempatan Kerja di DKI Jakarta pada tahun 2001-2011.
- b. Diduga Investasi berpengaruh positif terhadap Kesempatan Kerja di DKI Jakarta pada tahun 2001-2011.
- c. Diduga UMP berpengaruh negatif terhadap Kesempatan Kerja di DKI Jakarta pada tahun 2001-2011.